

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harsono, Boedi, 1974, *Hukum Agraria Indonesia Bagian Pertama Jilid I*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 1994, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah)*, Djambatan Jakarta.
- _____, 1999, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya)*, Jambatan Jakarta.
- _____, 2002, *Hukum Agraria Indonesia ((Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah)*, Jambatan Jakarta.
- Hutagalung, Ari Sukanti, 1994, *Majalah Bumi Bakti No. 7 Tahun 1997*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Kartasapoetra, G, 1992, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kejaksaan Agung, 1995, *Tindak Lanjut Raker 1993 / 1994, Buku IV Kejaksaan Agung RI* Jakarta.
- _____, 1996, *Himpunan Informasi dan Petunjuk JAMDATUN, Buku VI Kejaksaan Agung RI* Jakarta.
- _____, 1997, *Himpunan Informasi dan Petunjuk JAMDATUN, Buku X Kejaksaan Agung RI* Jakarta.
- _____, 2000, *Himpunan Informasi dan Petunjuk JAMDATUN, Buku XVI Kejaksaan Agung RI* Jakarta.
- _____, 1995, *Himpunan Peraturan dan Wewenang Kejaksaan Agung RI*, Jakarta.
- _____, 1985, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta.
- _____, 1998, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jilid VIII*, Kejaksaan Agung, Jakarta.
- _____, 1998, *Abstraksi Himpunan Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI*, Kejaksaan Agung RI, jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, Citra Aditya Bandung

- Parlindungan, AP, 1994, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju Bandung.
- _____, 1998, *Komentor Atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1997, *Majalah Bumi Bakti No. 7 Tahun 1994*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Peters, A.A.G dan Koesrini Siswo Soebroto, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Sosiologi Hukum III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- PT Kereta Api Indonesia, (Tanpa tahun), *Tanah Kereta Api (Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria dan Hukum Perbendaharaan Negara*, Bandung.
- _____, 2000, *Tanah Kereta Api*, Bandung
- PERUMKA, 1992, *Penelitian Kasus-kasus tanah PERUMKA*, Perumka Bandung.
- Sanusi, 1998, *Pengelolaan Tanah Negara dan Permasalahannya di Kodya Semarang (Thesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UGM)*, UGM Yogyakarta.
- Simorangkir, 1986, *Hukum dan Konstitusi Indonesia Jilid II*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Simon,Oerip,1953, *Kereta Api Indonesia (SS/SS-VS/DKARI/DKA)*, PB Persatuan Buruh Kereta Api, Bandung.
- Sumardjono, Maria, S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasinya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1994, *Tanah Negara* (Artikel kompas tanggal 15 September 1994).
- Sumowidono,Kustono, 1978, *Himpunan Peraturan-peraturan tentang Pengurusan Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara*, CV Tujuh Enam,Jakarta.
- Soemitro,Rony H., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Sugiarto, 1994, *Majalah Bumi Bakti No. 7 Tahunn 1997*, Badan Pertanahan Nasional Jakarta
- Soehadibroto, 1996, *Kredit Macet Tinjauan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya*, Yayasan Widia Patria, Jakarta.

_____, 1999, *Restruktisasi Kejaksaan guna Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Tantangan Zaman*, Makalah dalam Diskusi Panel Reformasi Kejaksaan 11 – 12 Februari

Samosir, L.M.M., 1999, *Restruktisasi Kejaksaan guna Optimalisasi Pelaksanaan Tugas*, Makalah dalam Diskusi Panel Reformasi Kejaksaan 11 – 12 Februari.

Vollmar, H.F.A., 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Terjemahan I.S. Adi Winarto, Rajawali Press, Jakarta.

Widjaya, Gunawan, 2002, *Pengelolaan harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Zein, Dasrien, 1995, *Tatalaksana Pengelolaan Tanah Instansi Pemerintah*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Peraturan Perundang – undangan:

Undang – undang Dasar 1945.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Undang-undang No. 12 Tahun 1993 tentang Perkeretaapian.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kepailitan.

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Kepja Nomor 115 / JA / 10 / 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.